

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Investasi Di Kabupaten Kutai Timur Dengan Variabel Kebijakan Pemberian Izin Sebagai Variabel Mediasi

Suhartini¹, Aji Sofyan Effendi², Diana Lestari³

^{1,2,3} Universitas Mulawarman, Indonesia

E-mail: tinietoon02@gmail.com¹, iseisamarinda2021@gmail.com²,
diana.lestari@feb.unmul.ac.id³

Article History:

Received: 19 September 2025

Revised: 28 September 2025

Accepted: 01 Oktober 2025

Keywords:

Economic Growth, Investment Permits, Investment Value

Abstract: This study aims to analyze the effect of economic growth rate, credit distribution, infrastructure expenditure, and regional budget (APBD) on the number of investment permits issued and the total investment value. The analytical method employed is Partial Least Square (PLS) using secondary data processed through statistical software. The findings show that the research model demonstrates strong explanatory power, with R-square values of 0.872 for investment permits and 0.604 for investment value, both categorized as strong. The Q-square results indicate high predictive relevance, while the SRMR test confirms excellent model fit. Multicollinearity analysis shows no serious disturbances, allowing valid interpretation of inter-variable relationships. Direct effect testing reveals that economic growth rate and credit distribution have a significant positive impact on the number of investment permits, whereas infrastructure expenditure shows a significant negative effect. On the other hand, regional budget allocation has a significant positive impact on investment value. Indirect effect analysis confirms that the number of investment permits mediates the influence of economic growth, credit, and infrastructure expenditure on investment value. Overall, the results emphasize that strengthening economic growth and optimizing the regional budget are dominant factors in encouraging investment realization, both in terms of permits and investment value.

PENDAHULUAN

Investasi memiliki peran penting dalam pembangunan daerah karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, hingga memperkuat daya saing wilayah (Mubyarto, 2003). Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi besar dengan sumber daya alam melimpah, infrastruktur berkembang, dan letak strategis, namun

tingkat investasinya masih menghadapi hambatan seperti regulasi, akses pembiayaan, dan kebijakan fiskal daerah. Regulasi yang transparan serta kemudahan izin investasi menjadi variabel penting yang dapat memperkuat hubungan antara faktor-faktor ekonomi—pertumbuhan ekonomi, kredit perbankan, belanja infrastruktur, dan APBD dengan tingkat investasi di daerah tersebut.

Grant Thornton Indonesia dan Katadata Insight Center (2024) menekankan bahwa meskipun terdapat tantangan global, Indonesia tetap memiliki peluang investasi besar jika didukung strategi yang tepat, terutama pada sektor industri. Hal ini sejalan dengan urgensi menciptakan iklim investasi kondusif di Kutai Timur melalui kepastian hukum, kualitas infrastruktur, dan peningkatan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi investasi dengan pemberian izin investasi sebagai variabel mediasi, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk menarik modal, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Teori Investasi Klasik

Teori investasi klasik dikembangkan oleh para ekonom seperti Adam Smith (1776), David Ricardo (1817), dan John Stuart Mill (1848) yang menekankan peran tingkat bunga, tabungan, serta mekanisme pasar bebas dalam mendorong investasi. Smith menekankan peran akumulasi modal bagi pertumbuhan ekonomi, Ricardo memperkenalkan *law of diminishing returns* dan kaitannya dengan tingkat laba sebagai pendorong investasi, sedangkan Mill menambahkan pentingnya tabungan dan permintaan agregat. Kritik utama teori klasik adalah kurang memperhatikan ketidakpastian pasar, permintaan agregat, serta rigiditas harga dan upah, meskipun tetap menjadi dasar teori investasi modern.

Teori Investasi Keynesian

John Maynard Keynes (1936) dalam *The General Theory of Employment, Interest, and Money* menekankan bahwa investasi tidak hanya dipengaruhi tingkat bunga, tetapi juga Marginal Efficiency of Capital (MEC), ekspektasi bisnis, dan permintaan agregat. Konsep efek multiplier menunjukkan bahwa peningkatan investasi akan berdampak ganda pada pertumbuhan ekonomi. Namun, teori ini dikritik karena terlalu fokus pada jangka pendek, bergantung pada kebijakan pemerintah, dan kurang memperhatikan peran teknologi, meskipun hingga kini tetap relevan dalam menghadapi krisis dan resesi global.

Teori Investasi Neoklasik

Robert Solow (1956) dan Dale W. Jorgenson (1963) mengembangkan teori investasi neoklasik yang menekankan peran biaya modal, teknologi, serta produktivitas tenaga kerja dalam keputusan investasi. Jorgenson (1963) menekankan bahwa investasi ditentukan oleh biaya modal dan ekspektasi keuntungan barang modal, sementara Solow menambahkan bahwa akumulasi modal saja tidak cukup tanpa kemajuan teknologi. Teori ini relevan dalam kebijakan moneter dan perpajakan modern, meski dikritik karena mengabaikan ketidakpastian pasar, permintaan agregat, serta asumsi pasar sempurna yang jarang terjadi dalam praktik ekonomi.

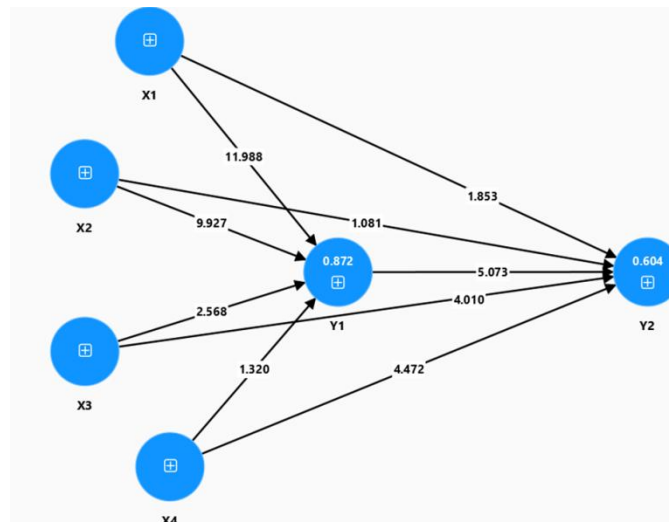
METODE PENELITIAN

Observasi lapangan dilakukan dengan mengunjungi objek penelitian secara langsung untuk memperoleh data konkret dari instansi terkait. (Sugiyono, 2019). Untuk analisis dan pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) yang dikenal sebagai teknik statistik multivariat yang mampu menangani banyak variabel independen sekaligus, termasuk dalam kondisi multikolinearitas. PLS unggul karena tidak memerlukan asumsi distribusi normal multivariat serta dapat digunakan dengan berbagai jenis skala data, baik kategori, ordinal, interval, maupun rasio. Model analisis PLS mencakup measurement model (*outer model*) baik reflektif maupun formatif, serta structural model (*inner model*) yang menunjukkan hubungan antar variabel laten. Menurut Ghozali dan Kusumadewi (2023), PLS merupakan metode yang kuat (*powerful*) karena tetap robust meskipun ukuran sampel kecil dan mampu menghasilkan estimasi parameter yang stabil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Outer Model Test (Pengujian Outer Model)

Pengujian *outer model* tidak dilakukan karena seluruh konstruk yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel manifest, sehingga setiap variabel diukur secara langsung tanpa menggunakan indikator-indikator pembentuknya.



Gambar 1. Outer Model

Tabel 1. Goodness of fit model R²

	R-square	Kategori
Jumlah Pemberian Izin Investasi	0,872	<i>strong</i>
Jumlah Nilai Investasi	0,604	<i>strong</i>

Sumber data: Data diolah 2025.

Hasil nilai *R-square* menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai *R-square* sebesar 0,872 pada variabel Jumlah Pemberian Izin Investasi mengindikasikan bahwa 87,2% variasi pada variabel tersebut dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Sementara itu, nilai *R-square* sebesar

0,604 pada variabel Jumlah Nilai Investasi menunjukkan bahwa 60,4% variasinya juga dapat dijelaskan oleh model. Kedua nilai tersebut termasuk dalam kategori kuat (strong), yang berarti model memiliki daya prediksi yang tinggi terhadap variabel yang diamati.

Tabel 2. Q-Square

	Q-square	Kategori
Jumlah Pemberian Izin Investasi	0,867	Big predictive relevance
Jumlah Nilai Investasi	0,600	Big predictive relevance

Sumber: data diolah (2025)

Tabel 3. *Standardized Root Mean Square Residual*

Komponen	SRMR	Estimated Model
Saturated Model	0,000	<i>Fit</i>
Estimated Model	0,000	

Sumber: data diolah (2025)

Nilai *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR) digunakan untuk menilai kesesuaian model secara keseluruhan. Nilai SRMR sebesar 0,000 pada baik saturated model maupun estimated model menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang sangat baik. Semakin mendekati angka nol, semakin baik tingkat fit model terhadap data. Oleh karena itu, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan sangat sesuai dan valid dalam merepresentasikan hubungan antar variabel

Tabel 4. Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	Y1	Y2
X1					4,916	12,884
X2					2,989	5,622
X3					9,537	9,832
X4					22,743	23,164
Y1						7,840
Y2						

Sumber: data diolah (2025)

Hasil analisis multikolinearitas menunjukkan bahwa semua nilai VIF berada di atas angka 1 namun masih di bawah ambang batas 30, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius dalam model. Nilai VIF tertinggi terdapat pada variabel X4 (Besaran APBD) terhadap Y1 dan Y2, yaitu sebesar 22,743 dan 23,164, namun masih dapat ditoleransi. Variabel lainnya seperti X1, X2, dan X3 memiliki nilai VIF yang relatif lebih rendah, menandakan hubungan antar variabel independen tidak saling mengganggu secara ekstrem.

Tabel 5. *Effect Size* (f²)

	f-square
X1 -> Y1	1,621
X1 -> Y2	0,027
X2 -> Y1	0,881

X2 -> Y2	0,010
X3 -> Y1	0,031
X3 -> Y2	0,040
X4 -> Y1	0,019
X4 -> Y2	0,073
Y1 -> Y2	0,187

Sumber: data diolah (2025)

Hasil analisis *effect size* (f^2) menunjukkan bahwa hubungan X1 terhadap Y1 memiliki pengaruh sangat besar dengan nilai f^2 sebesar 1,621, sementara terhadap Y2 hanya memiliki pengaruh kecil sebesar 0,027. Variabel X2 juga memberikan pengaruh besar terhadap Y1 ($f^2 = 0,881$), namun sangat kecil terhadap Y2 ($f^2 = 0,010$). Sebaliknya, X3 dan X4 menunjukkan pengaruh kecil terhadap kedua variabel dependen, dengan nilai f^2 di bawah 0,10. Sementara itu, hubungan Y1 terhadap Y2 menunjukkan pengaruh sedang ($f^2 = 0,187$), yang berarti pemberian izin investasi memiliki kontribusi moderat terhadap peningkatan nilai investasi.

Tabel 6. Pengujian Pengaruh Langsung

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1 -> Y1	1,008	11,988	0,000
X1 -> Y2	-0,368	1,853	0,032
X2 -> Y1	0,580	9,927	0,000
X2 -> Y2	-0,152	1,081	0,140
X3 -> Y1	-0,194	2,568	0,005
X3 -> Y2	-0,397	4,010	0,000
X4 -> Y1	-0,232	1,320	0,093
X4 -> Y2	0,819	4,472	0,000
Y1 -> Y2	0,762	5,073	0,000

Sumber: Data diolah 2025.

Laju Pertumbuhan Ekonomi -> Jumlah Pemberian Izin Investasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Pemberian Izin Investasi signifikan dengan nilai p value $0,000 < 0,05$, T statistik $11,988 > 1,96$ dan koefisien jalur positif sebesar 1,008. Arah pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Laju Pertumbuhan Ekonomi maka semakin tinggi Jumlah Pemberian Izin Investasi, sebaliknya semakin menurun Laju Pertumbuhan Ekonomi maka semakin menurun Jumlah Pemberian Izin Investasi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi -> Jumlah Nilai Investasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Nilai Investasi signifikan dengan nilai p value $0,032 < 0,05$, T statistik $1,853 < 1,96$ dan koefisien jalur negatif sebesar -0,368. Arah pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Laju Pertumbuhan Ekonomi maka semakin menurun Jumlah Nilai Investasi, sebaliknya semakin menurun Laju Pertumbuhan Ekonomi maka semakin tinggi Jumlah Nilai Investasi. Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini terbukti merupakan faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap Jumlah Nilai Investasi, sehingga upaya-upaya peningkatan Jumlah Nilai Investasi dapat dilakukan dari pengelolaan Laju Pertumbuhan Ekonomi secara bijak.

Jumlah Pemberian Kredit -> Jumlah Pemberian Izin Investasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh Jumlah Pemberian Kredit terhadap Jumlah Pemberian Izin Investasi signifikan dengan nilai p value $0,000 < 0,05$, T statistik $9,927 > 1,96$ dan koefisien jalur positif sebesar 0,580. Arah pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Jumlah Pemberian Kredit maka semakin tinggi Jumlah Pemberian Izin Investasi, sebaliknya semakin menurun Jumlah Pemberian Kredit maka semakin menurun Jumlah Pemberian Izin Investasi. Jumlah Pemberian Kredit dalam penelitian ini terbukti merupakan faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap Jumlah Pemberian Izin Investasi, sehingga upaya-upaya peningkatan Jumlah Pemberian Izin Investasi dapat dilakukan dari peningkatan Jumlah Pemberian Kredit.

Jumlah Pemberian Kredit -> Jumlah Nilai Investasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh Jumlah Pemberian Kredit terhadap Jumlah Nilai Investasi tidak signifikan dengan nilai p value $0,140 > 0,05$, T statistik $1,081 < 1,96$ dan koefisien jalur negatif sebesar -0,152. Arah pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Jumlah Pemberian Kredit maka semakin menurun Jumlah Nilai Investasi, sebaliknya semakin menurun Jumlah Pemberian Kredit maka semakin tinggi Jumlah Nilai Investasi.

Jumlah Belanja Infrastruktur -> Jumlah Pemberian Izin Investasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh Jumlah Belanja Infrastruktur terhadap Jumlah Pemberian Izin Investasi signifikan dengan nilai p value $0,005 < 0,05$, T statistik $2,568 > 1,96$ dan koefisien jalur negatif sebesar -0,194. Arah pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Jumlah Belanja Infrastruktur maka semakin menurun Jumlah Pemberian Izin Investasi, sebaliknya semakin menurun Jumlah Belanja Infrastruktur maka semakin tinggi Jumlah Pemberian Izin Investasi.

Jumlah Belanja Infrastruktur -> Jumlah Nilai Investasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh Jumlah Belanja Infrastruktur terhadap Jumlah Nilai Investasi signifikan dengan nilai p value $0,000 < 0,05$, T statistik $4,010 > 1,96$ dan koefisien jalur negatif sebesar -0,397. Arah pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Jumlah Belanja Infrastruktur maka semakin menurun Jumlah Nilai Investasi, sebaliknya semakin menurun Jumlah Belanja Infrastruktur maka semakin tinggi Jumlah Nilai Investasi.

Besaran APBD -> Jumlah Pemberian Izin Investasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh Besaran APBD terhadap Jumlah Pemberian Izin Investasi tidak signifikan dengan nilai p value $0,093 > 0,05$, T statistik $1,320 < 1,96$ dan koefisien jalur negatif sebesar -0,232. Arah pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Besaran APBD maka semakin menurun Jumlah Pemberian Izin Investasi, sebaliknya semakin menurun Besaran APBD maka semakin tinggi Jumlah Pemberian Izin Investasi.

Besaran APBD -> Jumlah Nilai Investasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh Besaran APBD terhadap Jumlah Nilai Investasi signifikan dengan nilai p value $0,000 < 0,05$, T statistik $4,472 > 1,96$ dan koefisien jalur positif sebesar 0,819. Arah pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Besaran APBD maka semakin tinggi Jumlah Nilai Investasi, sebaliknya semakin menurun Besaran APBD maka semakin menurun Jumlah Nilai Investasi.

Jumlah Pemberian Izin Investasi -> Jumlah Nilai Investasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh Jumlah Pemberian Izin Investasi terhadap Jumlah Nilai Investasi signifikan dengan nilai p value $0,000 < 0,05$, T statistik $5,073 > 1,96$ dan koefisien jalur positif sebesar 0,762. Arah pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Jumlah Pemberian Izin Investasi maka semakin tinggi Jumlah Nilai Investasi, sebaliknya

semakin menurun Jumlah Pemberian Izin Investasi maka semakin menurun Jumlah Nilai Investasi.

Tabel 7. Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1 -> Y1 -> Y2	0,769	4,585	0,000
X2 -> Y1 -> Y2	0,442	4,890	0,000
X3 -> Y1 -> Y2	-0,148	2,016	0,022
X4 -> Y1 -> Y2	-0,177	1,303	0,096

Sumber : data diolah (2025)

Laju Pertumbuhan Ekonomi – Jumlah Pemberian Izin

Investasi – Jumlah Nilai Investasi

Hasil pengujian pengaruh tidak langsung Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Nilai Investasi melalui Jumlah Pemberian Izin Investasi menunjukkan signifikansi sebesar 0,000 dengan koefisien jalur sebesar 0,769. Oleh karena nilai p value diperoleh $<0,05$ maka disimpulkan bahwa Jumlah Pemberian Izin Investasi terbukti dapat memediasi pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah Nilai Investasi.

Jumlah Pemberian Kredit – Jumlah Pemberian Izin Investasi – Jumlah Nilai Investasi

Hasil pengujian pengaruh tidak langsung Jumlah Pemberian Kredit terhadap Jumlah Nilai Investasi melalui Jumlah Pemberian Izin Investasi menunjukkan signifikansi sebesar 0,000 dengan koefisien jalur sebesar 0,442. Oleh karena nilai p value diperoleh $<0,05$ maka disimpulkan bahwa Jumlah Pemberian Izin Investasi terbukti dapat memediasi pengaruh Jumlah Pemberian Kredit terhadap Jumlah Nilai Investasi.

Jumlah Belanja Infrastruktur – Jumlah Pemberian Izin Investasi – Jumlah Nilai Investasi

Hasil pengujian pengaruh tidak langsung Jumlah Belanja Infrastruktur terhadap Jumlah Nilai Investasi melalui Jumlah Pemberian Izin Investasi menunjukkan signifikansi sebesar 0,022 dengan koefisien jalur sebesar -0,148. Oleh karena nilai p value diperoleh $<0,05$ maka disimpulkan bahwa Jumlah Pemberian Izin Investasi terbukti dapat memediasi pengaruh Jumlah Belanja Infrastruktur terhadap Jumlah Nilai Investasi.

Besaran APBD – Jumlah Pemberian Izin Investasi – Jumlah Nilai Investasi

Hasil pengujian pengaruh tidak langsung Besaran APBD terhadap Jumlah Nilai Investasi melalui Jumlah Pemberian Izin Investasi menunjukkan signifikansi sebesar 0,096 dengan koefisien jalur sebesar -0,177. Oleh karena nilai p value diperoleh $>0,05$ maka disimpulkan bahwa Jumlah Pemberian Izin Investasi tidak memediasi pengaruh Besaran APBD terhadap Jumlah Nilai Investasi.

Tabel 8. Pengaruh Total

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1 -> Y1	1,008	11,988	0,000
X1 -> Y2	0,401	3,956	0,000

X2 -> Y1	0,580	9,927	0,000
X2 -> Y2	0,290	3,002	0,001
X3 -> Y1	-0,194	2,568	0,005
X3 -> Y2	-0,544	5,738	0,000
X4 -> Y1	-0,232	1,320	0,093
X4 -> Y2	0,643	3,561	0,000
Y1 -> Y2	0,762	5,073	0,000

Sumber : data diolah (2025)

Laju Pertumbuhan Ekonomi → Jumlah Pemberian Izin Investasi

Pengaruh total laju pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah pemberian izin investasi sebesar 1,008 dengan nilai p-value $0,000 < 0,05$ dan T statistik $11,988 > 1,96$. Ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh total yang signifikan dan positif terhadap jumlah pemberian izin investasi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi → Jumlah Nilai Investasi

Pengaruh total laju pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah nilai investasi sebesar 0,401 dengan nilai p-value $0,000 < 0,05$ dan T statistik $3,956 > 1,96$. Ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh total yang signifikan dan positif terhadap jumlah nilai investasi.

Jumlah Pemberian Kredit → Jumlah Pemberian Izin Investasi

Pengaruh total jumlah pemberian kredit terhadap jumlah pemberian izin investasi sebesar 0,580 dengan nilai p-value $0,000 < 0,05$ dan T statistik $9,927 > 1,96$. Ini menunjukkan bahwa jumlah pemberian kredit memiliki pengaruh total yang signifikan dan positif terhadap jumlah pemberian izin investasi.

Jumlah Pemberian Kredit → Jumlah Nilai Investasi

Pengaruh total jumlah pemberian kredit terhadap jumlah nilai investasi sebesar 0,290 dengan nilai p-value $0,001 < 0,05$ dan T statistik $3,002 > 1,96$. Ini menunjukkan bahwa jumlah pemberian kredit memiliki pengaruh total yang signifikan dan positif terhadap jumlah nilai investasi.

Jumlah Belanja Infrastruktur → Jumlah Pemberian Izin Investasi

Pengaruh total jumlah belanja infrastruktur terhadap jumlah pemberian izin investasi sebesar -0,194 dengan nilai p-value $0,005 < 0,05$ dan T statistik $2,568 > 1,96$. Ini menunjukkan bahwa jumlah belanja infrastruktur memiliki pengaruh total yang signifikan namun negatif terhadap jumlah pemberian izin investasi.

Jumlah Belanja Infrastruktur → Jumlah Nilai Investasi

Pengaruh total jumlah belanja infrastruktur terhadap jumlah nilai investasi sebesar -0,544 dengan nilai p-value $0,000 < 0,05$ dan T statistik $5,738 > 1,96$. Ini menunjukkan bahwa jumlah belanja infrastruktur memiliki pengaruh total yang signifikan dan negatif terhadap jumlah nilai investasi.

Besaran APBD → Jumlah Pemberian Izin Investasi

Pengaruh total besaran APBD terhadap jumlah pemberian izin investasi sebesar -0,232 dengan nilai p-value $0,093 > 0,05$ dan T statistik $1,320 < 1,96$. Ini menunjukkan bahwa besaran APBD tidak memiliki pengaruh total yang signifikan terhadap jumlah pemberian izin investasi.

Besaran APBD → Jumlah Nilai Investasi

Pengaruh total besaran APBD terhadap jumlah nilai investasi sebesar 0,643 dengan nilai p-value $0,000 < 0,05$ dan T statistik $3,561 > 1,96$. Ini menunjukkan bahwa besaran APBD memiliki pengaruh total yang signifikan dan positif terhadap jumlah nilai investasi.

Jumlah Pemberian Izin Investasi → Jumlah Nilai Investasi

Pengaruh total jumlah pemberian izin investasi terhadap jumlah nilai investasi sebesar 0,762 dengan nilai p-value $0,000 < 0,05$ dan T statistik $5,073 > 1,96$. Ini menunjukkan bahwa jumlah pemberian izin investasi memiliki pengaruh total yang signifikan dan positif terhadap jumlah nilai investasi.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh total, variabel yang memiliki pengaruh total paling besar terhadap Jumlah Pemberian Izin Investasi (Y1) adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (X1) dengan koefisien sebesar 1,008 dan pengaruh signifikan positif, sedangkan terhadap Jumlah Nilai Investasi (Y2) pengaruh terbesar berasal dari Besaran APBD (X4) dengan koefisien sebesar 0,643 yang juga signifikan positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi faktor dominan dalam mendorong jumlah izin investasi yang diterbitkan, sementara peningkatan besaran APBD merupakan pendorong utama terhadap nilai investasi yang direalisasikan.

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Variabel	R-square	R-square adjusted
Jumlah Pemberian Izin Investasi	0,529	0,526
Jumlah Nilai Investasi	0,514	0,508

Sumber : data diolah (2025)

Nilai *adjusted R-square* pada variabel Jumlah Pemberian Izin Investasi sebesar 0,526 berarti bahwa 52,6% variansi Jumlah Pemberian Izin Investasi dipengaruhi oleh variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pemberian Kredit, Jumlah Belanja Infrastruktur, dan Besaran APBD, sedangkan sisanya yaitu 47,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini.

Nilai *adjusted R-square* pada variabel Jumlah Nilai Investasi sebesar 0,508 berarti bahwa 50,8% variansi Jumlah Nilai Investasi dipengaruhi oleh variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pemberian Kredit, Jumlah Belanja Infrastruktur, Besaran APBD, dan Jumlah Pemberian Izin Investasi, sedangkan sisanya yaitu 49,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemberian kredit merupakan faktor penting yang mendorong peningkatan izin investasi, yang selanjutnya berperan signifikan dalam meningkatkan nilai investasi. Sebaliknya, belanja infrastruktur justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap iklim investasi, menandakan perlunya sinkronisasi kebijakan pembangunan dengan kebutuhan sektor investasi. APBD berpengaruh langsung terhadap nilai investasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada mekanisme alokasi yang pro-investasi. Temuan ini menegaskan bahwa pemberian izin investasi memegang peran strategis sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap realisasi investasi, serta menunjukkan bahwa model penelitian yang digunakan reliabel dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

DAFTAR REFERENSI

- Anonim. (2024). Grant Thornton Indonesia, bekerja sama dengan Katadata Insight Center.
Anonym. (n.d.). Glosarium. Otoritas Jasa Keuangan.
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). Investments (10th ed.). McGraw-Hill Education.
Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future. Oxford University Press.

- Elton, E. J., & Gruber, M. J. (1995). *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis*. John Wiley & Sons.
- Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383-417. Wiley.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press.
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A.(2023). *Partial least squares: Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 4.0*. Yoga Pratama.
- Intania Widya Sari. (2022). *Analisis Investasi di Indonesia terhadap Kemiskinan dan Pengangguran dengan Variabel Intervening Pertumbuhan Ekonomi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jorgenson, D. W. (1963). Capital Theory and Investment Behavior. *The American Economic Review*, 53(2), 247-259. American Economic Association.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Macmillan.
- Malthus, T. R. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. J. Johnson.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77-91. Wiley.
- Mill, J. S. (1848). *Principles of Political Economy*. Longmans, Green, and Co.
- Mubyarto. (2003). *Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila*.
- Mubyarto. (2003). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 18*(3), 218–224.
- Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray.
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-1037.
- Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. *The Journal of Finance*, 19(3), 425-442. Wiley.
- Sharpe, W. F. (1999). *Investments*. Prentice Hall.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell.
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94. Harvard University Press.
- Sundaram, K. P. M. (2013). *Banking Theory, Law, and Practice*. Sultan Chand & Sons.
- Peter S. Rose & Sylvia C. Hudgins. (2018). *Bank Management & Financial Services*. McGraw-Hill Education.